

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA KELURAHAN KELUN
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2024**

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INFORMASI			JENIS INFORMASI				RETENSI ARSIP
				ONLINE	CETAK	REKAM	BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	
I.	Profil Pemerintah Kota Madiun										
	Alamat Kantor dan No.Telp Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan	Informasi alamat dan nomor telepon Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	PPID Pelaksana	✓	✓		✓				Selama Berlaku
	Profil dan Monografi Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	Kumpulan data Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	PPID Pelaksana	✓	✓		✓				Selama Berlaku
	Struktur Organisasi dan Struktur PPID Pembantu	Struktur dan Struktur PPID Pembantu Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	PPID Pelaksana	✓	✓		✓				Selama Berlaku
	Visi dan Misi Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	Visi dan Misi Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	PPID Pelaksana	✓			✓				Selama Berlaku

II	Kinerja Badan Publik										
	Selayang Pandang Jadwal Program Kegiatan dan Anggaran Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	Gambaran Umum Kegiatan Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	PPID Pelaksana	✓			✓				Selama Berlaku
III	Laporan Akses Informasi										
	Waktu Pelayanan Informasi Publik	Informasi hari dan jam pelayanan informasi publik	PPID Pelaksana	✓	✓		✓				Selama Berlaku
IV	Laporan Keuangan										
	RUP-SKPD	Informasi RUP Satuan Kerja Perangkat Daerah	PPID Pelaksana	✓	✓		✓				Selama Berlaku
	LKPD	Informasi laporan keuangan Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	PPID Pelaksana	✓			✓				Selama Berlaku
V	Peraturan Badan Publik										
	Peraturan Perundang-undangan keputusan dan kebijakan yang disahkan	Informasi Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan Kebijakan yang disahkan.	PPID Pelaksana	✓			✓				Selama Berlaku

VI	Tata Cara Memperoleh Informasi Publik										
	Prosedur Layanan Informasi Publik	Informasi Prosedur Layanan Informasi Publik	PPID Pelaksana	✓			✓				Selama Berlaku
VII	Tata Cara Pengaduan										
	Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran	Informasi Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran	PPID Pelaksana	✓			✓				Selama Berlaku
VIII	Seputar Madiun										
	Seputar Kegiatan Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	Informasi Seputar Kegiatan Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	PPID Pelaksana	✓	✓	✓	✓				Selama Berlaku

Madiun, 4 April 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. Camat Kartoharjo
Lurah Kelun,



PARDI, S.E.
Penata Muda Tingkat I
NIP 19690206199103

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN KELUN
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2024**

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS PENGECEUALIAN WAKTU
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	Arsip daftar orang yang masuk G30S/PKI dan organisasi terlarang lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j. - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h 	Dapat mengungkap data pribadi.	Melindungi data pribadi.	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan atau pihak yang berwenang.
2	<p>Arsip dinamis, aktif, dan inaktif yang berisikan :</p> <p>a. Dokumen Keuangan</p> <p>-SPJ berikut lampirannya dokumen anggaran dan otorisasinya</p> <p>-Surat pencairan anggaran</p> <p>b. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p> <p>c. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan</p> <p>d. Disposisi surat pimpinan</p> <p>c. Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2) - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penegakan hukum - Mengganggu kepentingan perlindungan hak - Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi - Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan data lengkap yang dilindungi proses penegakan hukum - Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi - Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku - Selama masih berlangsung penyelenggaraannya - Selama status perlindungan masih berlaku - Sampai dengan proses penyelesaian konflik

3	Data Pribadi Penduduk (KK, NIK, dan data pribadi lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf j. - UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2, Pasal 85 Ayat 1,2, dan 3 - UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 Ayat 1, Pasal 79 Ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. - Dapat disalahgunakan oleh pihak lain. 	Melindungi data pribadi	Permanen atau sampai mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
4	Data Pribadi Pegawai (ASN dan Tenaga Upahan)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan D7(2) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap data pribadi seseorang. - Dapat disalahgunakan oleh pihak lain 	Melindungi data pribadi pegawai	Permanen
5	Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja Pegawai	PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain.	Bisa menjaga keakuratan dan objektivitas PNS.	Selama masih berlaku
6	Keputusan Ijin/ Keterangan tentang Perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No.8 Tahun 1974 tentang Perkawinan - PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan

7	Data Objek Pajak dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 40 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak.	Melindungi dan mengamankan database obyek pajak.	Sampai ada perintah penegak hukum yang berwenang.
8	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi.	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan.
9	Kode akses aplikasi elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 ITE Pasal 30 Ayat 1,2, dan 3 	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang lain.	Melindungi dan mengamankan data	Permanen
10	Data usulan calon ataupun penerima bantuan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menyebabkan kecemburuan sosial - Dapat menyebabkan penyalagunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi. - Mengamankan proses penyusunan kebijakan. 	Sampai ada izin dari pihak yang bersangkutan atau perintah dari pihak yang berwenang.

11	Pengaduan dari masyarakat di tingkat Kelurahan (Menjaga rahasia masalah & pihak-pihak yang ikut terlibat)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, g, dan h. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi. - Dapat membahayakan keselamatan pihak yang ikut terlibat - Dapat menimbulkan masalah baru dengan pihak lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia dan data pribadi. - Menjaga rahasia masalah. - Melindungi pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian masalah. 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan.
----	---	--	--	---	---

Madiun, 4 April 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

a.n. Camat Kartoharjo

Lurah Kelun,



P A R D I, S.E.

Penata Muda Tingkat I

NIP 19690206199103